

NPM SEBAGAI MODEL *UNIVERSITY GOVERNANCE* MODERN (ANALISIS KRITIS DALAM PERSPEKTIF KETAUHIDAN)

Nur Sayidah¹
Iwan Triyuwono²
Eko Ganis Sukoharsono³
Ali Djamhuri⁴

¹Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
^{2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Abstract: *This article discusses the NPM as a model of university governance in the epistemology of modernism. Epistemology of modernism is the idea of the search for truth that the emphasis on materialism. Modernity is characterized by corporatism in the university as a result of the invasion of NPM in the university. The principle applied in the management of the business sector in the university so as to produce the commodification and commercialization of education is supported by the measurement of efficiency, efektifitas and financial accountability in all its activities for the purpose of which is to win the economic materialistic. Materialism character contrary to the teachings of Islam, because the human character is basically characterized by the belief of monotheism human form of God.*

Keywords: *NPM, University Governance, Islam*

Universitas mempunyai karakter dan identitas nasional yang berakar pada budaya dan norma masyarakat di mana universitas tersebut berada (Nagy dan Robb, 2008). Fungsi universitas sering didefinisikan sebagai konservasi dan transmisi pengetahuan, riset dan pengajaran serta pelayanan masyarakat (Markwell, 2003). Sementara itu tujuannya adalah mempertahankan *learning society* (Dearing Report, 1997) serta menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan (Markwell, 2005; Tilaar, 2009).

Karena fungsi dan tujuannya tersebut maka universitas yang ideal menurut seorang humanis Jerman bernama Wilhelm von Humboldt haruslah berbentuk sebuah badan yang akuntabel (Baert dan Shipman, 2005) dan bersifat otonom atau mandiri (Hagen, 2002). Universitas dalam hal ini dipandang sebagai *communities of teachers and students* (Kellermenn, 2011) atau *communities of scholars* yang melakukan penelitian dan pembelajaran bersama (Deem, 1998). Pandangan ini menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan universitas secara tradisional bersifat bebas. Pendidikan universitas bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi

seorang "gentleman", yang berpikir dan bertindak secara moral dan bebas dari tuntutan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi seorang tenaga ahli (Tilling, 2002).

Tekanan ekonomi akibat perubahan lingkungan seperti kemajuan industri dan teknologi informasi serta globalisasi telah mengubah sifat tradisional dan bentuk ideal universitas. Universitas dipandang sebagai sebuah institusi ekonomi (Braunig, 2011) sehingga tujuan humanistiknya (Hagen, 2002, Menon, 2003) menjadi dipersempit. Universitas menjadi tempat untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja guna memenuhi kebutuhan industri. Aspek rasionalisme ekonomi menjadi watak dalam universitas seperti yang terjadi di Perancis. Pada tahun 1800-an, model universitas di Perancis berkembang menjadi tempat training profesional sementara di Amerika sekitar tahun 1900-an universitas mengarah pada korporasi modern (Swanson, dkk., 2005).

Dorongan untuk melakukan efisiensi dan pencapaian kinerja, membuat universitas lebih fokus pada manajemen dan kurang memperhatikan proses kolegial dalam pengambilan keputusan akademik

(Waugh, 2003). Universitas mengalami perubahan model struktur dari yang asli (tradisional) yaitu struktur *collegiate* Eropa menuju struktur korporasi (Parker, 2010) yang lebih managerial dengan kontrol eksekutif yang lebih kuat (Kelleher, 2006). Invasi pengelolaan bisnis modern ke dalam sektor publik termasuk universitas dikenal dengan istilah NPM¹ atau *New Public Management*. NPM merupakan doktrin neoliberal yang mengintegrasikan konsep manajemen sektor privat dan mekanisme pasar ke dalam sektor publik (Almquist, 2012). NPM telah menggeser fokus dalam sistem manajemen dari input dan proses menuju output dan outcome yang diukur dan dikuantifikasi melalui indikator kinerja dan standar yang eksplisit (Middlehurst, 2004).

Pergeseran sistem dan aktivitas pendidikan tinggi menuju yang *measurable* dan *commodifiable* seperti ini disebut dengan korporatisasi pendidikan tinggi (Neumann dan Guthrie, 2002). Fokus pendidikan tinggi berubah menjadi komodifikasi pengetahuan. Pengetahuan dipakai sebagai pendorong perkembangan ekonomi nasional dengan tujuan utama untuk aplikasi industri. Jasa dan produk universitas merupakan komoditas kunci untuk diekspor. Universitas menghasilkan *output*/lulusan yang siap kerja, dan beroperasi berdasarkan pada *value for money* (Parker, 2010).

Pendidikan tinggi mengalami kapitalisasi yang didominasi kelompok elit dan pemilik modal. Hal itu tecermin pada kebijakan pengelola perguruan tinggi yang menawarkan aneka program melalui jalur khusus (nonreguler) mengikuti hukum penawaran dan permintaan (Alhumami, 2010). Pendidikan kita telah terjebak pada arus komersialisasi dan pragmatisme, sehingga menciptakan tatanan sosial-budaya-politik pragmatis (Anwar, 2008). Sikap dan tindakan manusia akan dikatakan benar dan berguna jika langsung menghasilkan uang-material (Anwar, 2008) sehingga materi menjadi ukuran tunggal dari kegagalan dan keberhasilan (Rais, 1998). Hampir semua kebijakan pengelolaan pendidikan tidak luput dari pertimbangan uang. Sikap pragmatis mendasari manusia untuk bertindak demi konsekuensi praktis-materialistis yang melahirkan manusia "*men of affairs-business men*" alias kapitalis dengan kekuatan uang dan material (Anwar, 2008).

Watak materialisme dengan corak kapitalis bertentangan dengan Islam, karena manusia pada dasarnya bukanlah berwatak materialisme, tetapi berwatak tauhid, yang ditandai dengan keyakinan manusia

akan wujud Allah (Muthahhari, 1992). Artikel ini akan menganalisis secara kritis invasi NPM ke dalam *university governance* yang telah mendorong terjadinya korporatisasi universitas yang materialis dan kapitalis. Analisis dilakukan dalam perspektif ketauhidan.

KAJIAN TEORI

University Governance dan Modernisme

Pemahaman terhadap modernisme tidak bisa dilepaskan dari modernitas. Menurut Sumarna (2005:15) modernitas dapat dipahami dalam tiga pengertian (Sumarna, 2005:15). *Pertama*, dalam dimensi tempat dan masyarakat yang melahirkan sains dan teknologi, modernitas lahir karena perubahan kultur masyarakat Eropa dan Barat. *Kedua*, dalam dimensi waktu, modernitas bermula ketika renaissance lahir, yaitu sekitar abad ke-16 di Italia. *Ketiga*, dalam dimensi pemikiran, modernitas lahir ketika terjadi perubahan pemikiran dan pembongkaran corak keilmuan yang Gerejani ke alam pikiran yang sekuler (Sumarna, 2005:15), permulaan terhadap pendewaan rasio dan pembongkaran terhadap fenomena personifikasi dalam ketuhanan (Shimogaki, 2007:141). Oleh karena itu kemodernan dipahami bukan sebagai modernitas tetapi modernisme sehingga masa kini dan "yang modern" harus dipahami bukan sebagai modernitas tetapi dalam rangka modernisme (Lash, 2004:132).

Modernisme dalam konteks universitas, dikarakteristikan dengan munculnya korporatisasi universitas (Macdonald, 2001) yang menggunakan label NPM (Saliterer dkk, 2009; 92). Nama dan ide-ide dasar NPM saat ini menjadi pembahasan di sebagian besar negara-negara industri Barat (Schedler and Proeller, 2002:163). NPM awalnya muncul di negara-negara Anglo-Saxon dan berganti istilah menjadi *New Steering Model* (NSM) ketika sampai di Uni Eropa. NSM ketika ditransfer ke universitas NSM berubah menjadi *New Steering Universities* atau disingkat USU (Braunig, 2011). NPM mengimplikasikan tekanan menuju modernisasi manajemen universitas (Reale dan Poti, 2009:92) dan telah mempengaruhi universitas untuk beroperasi dengan cara menyerupai bisnis (Gregory, 2007:223, Braunig, 2011, Kellermann, 2011). *Interface* antara NPM dan modernisasi menghasilkan tekanan-tekanan dalam organisasi pelayanan publik (Newman, 2002:77) yang mengubah secara radikal misi, nilai inti, strategi, struktur dan identitas akademik (Parker, 2011).

¹NPM disebut juga *manajerialisme* atau *model manajemen korporat* yang diterapkan di sektor publik termasuk universitas.

Epistemologi Modern yang Bersifat Materialisme

Epistemologi modern menurut Shimogaki (2004:32–33) mempunyai inti pemikiran yang melakukan pemisahan antara bidang sakral dan duniawi, materi dan ruh, subyektivitas dan obyektivitas serta kecenderungan ke arah reduksionisme. Pemisahan ini telah menyebabkan adanya pengakuan atas satu sisi dengan meninggalkan sisi yang lain. Dampak dikotomi ini pada ilmu pengetahuan modern adalah terjadinya sebuah gerakan yang berusaha melepaskan diri dari kungkungan teologis dan metafisika sehingga ilmu pengetahuan menjadi otonom dari pengaruh sifat abstrak metafisika (Budiman, 2002:37). Gerakan ini mendorong lahirnya pemikiran modernisme dengan ideologi yang menekankan pada materialisme sebagai pola hidup (Sumarna, 2005:15–22).

Materialisme yang mempunyai sejarah panjang sejak kaum atomis yaitu Demokritus sampai pada banyak ilmuwan modern sekarang ini, berkeyakinan bahwa di alam semesta tidak ada satupun perilaku yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum fisika, tidak ada yang disebut roh atau wujud metafisik yang immaterial, tanpa tubuh, tidak terdapat dalam ruang (Hashem, 2001:14). Di dunia ini yang ada hanya materi atau *nature* (Maksum, 2012:355). Bahkan manusiapun dalam filsafat modern dipahami dalam makna yang lebih sempit yaitu sebatas obyek materi yakni inderawi, obyektif dan empiris (Purwanto, 2007:107). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan modernisme merupakan pandangan yang bersifat parsial, memihak dan tidak adil.

Sifat parsial ini terlihat dengan adanya pandangan yang memisahkan antara masyarakat, alam dan realitas transenden. Ketiganya dihayati sebagai tiga bidang yang tidak ada sangkut pautnya satu sama lain (Suseno, 1995:58). Bahkan perhatian lebih terarah pada yang inderawi, langsung, duniawi daripada yang tidak langsung, rohani dan adiduniawi sehingga kriteria moral terdesak oleh bidang yang dilihat dengan kriteria manfaat (Suseno, 1995:8). Pemihakan terhadap kriteria yang bersifat materi ini menunjukkan sebuah ketidakadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa modernisme membangun ilmu pengetahuan secara parsial karena hanya mengakui wujud material (fisik) dan tidak mengakui wujud yang lain (immaterial). Pandangan ini berbeda dengan Islam yang dengan epistemologi tauhidnya memandang semua tingkatan wujud dari metafisik sampai fisik secara sama dan utuh

(Kartanegara, 2005:67). Ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari kesadaran religius tauhid (Bakar, 1995:20). Oleh karena itu pengetahuanpun sebagaimana dalam bidang kehidupan manusia, berpijak pada gagasan tentang ketidakparsialan (kesatuan), ketidakberpihakan serta keadilan yang merupakan sifat-sifat manusia yang mulia (Bakar, 1995:19). Epistemologi Islam secara fundamental berbeda dengan epistemologi dalam sains modern (Bakar, 1995:25) atau tradisi Barat dalam istilah Hassan Hanafi (2000).

Tradisi barat (modernisme) ini telah mempengaruhi tidak hanya budaya dan konsepsi tentang alam tetapi juga merambah pada gaya kehidupan sehari-hari (Hanafi, 2000:17). Pengaruh kekuatan modernisme yang serba materi ini dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari berupa prinsip realisasi diri yang tidak terbatas, dan motif hedonistik yang tidak terkendali (Sarup, 2008:223). Dalam bidang ekonomi, pengaruhnya tercermin dalam premis ekonomi modern yang kapitalis. Premis ekonomi modern memandang manusia sebagai makhluk homo ekonomikus dan mengikuti hukum pasar (Shimogaki, 2004:35). Persepsi homoekonomikus akan mengantarkan cara pandang manusia kepada realitas dari sudut pandang ekonomi saja (Triyuwono, 2000:xxx). Akibatnya orientasi hidup manusia adalah memiliki dan menguasai hal-hal materil dengan aturan main utama adalah *survival of the fittest* atau dalam skala besar menjadi persaingan pasar bebas (Maksum, 2012:312).

Pandangan ini bertentangan dengan pandangan manusia transedental yang mempunyai kemampuan kreatif dan nalar insani (Heriyanto, 2011:347). Manusia dalam Islam mempersepsikan diri sebagai *khalifat-u'L-Lah fi al-ardl* dengan cita-cita keadilan. Sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi manusia mempunyai kewajiban untuk menyebarkan rahmad bagi seluruh makhluk dan mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan.

METODE

Metode Analisis: Rekonstruksi Teologi (Tauhid) Sebagai Alat Analisis

Analisis terhadap model *university governance* modern dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan rekonstruksi teologi (tauhid) dari Hassan Hanafi. Hanafi (2010, 74–76) telah merekonstruksi enam identitas dzat (esensi) Tuhan yang mencakup *wujud, qidam, baqa', mukhalafah li al-huwadits, qiyam binafsih dan wahdaniyyah*

untuk tujuan kemanusiaan. *Wujud* menurut Hanafi berarti *tajribah wujudiyah* pada manusia, yaitu tuntutan pada umat manusia untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya seperti yang dimaksud dalam sebuah syair "kematian bukanlah ketiadaan nyawa, kematian adalah ketidakmampuan dalam menunjukkan eksistensi diri (Soleh, 2012:47). Eksistensi manusia dapat terangkat apabila manusia mempunyai sebuah kebebasan (Pulungan, 1996: 156), tanpa ada sesuatu yang menghegemoninya (Hanafi dan Jabiri, 2003:101). Berdasarkan pemaknaan ini maka *Wujud* mempunyai kandungan nilai kebebasan.

Qidam (dahulu) oleh Hanafi (2010:384) dimaknai sebagai asal (dasar/akar) dan sumber di masa silam. Akar yang dimaksud di sini adalah akar atau asal keberadaan manusia di dalam sejarah sedangkan sumber masa silam merupakan pengalaman kesejarahan (Soleh, 2012:47). *Qidam* (dahulu) merupakan modal pengalaman dan pengetahuan kesejarahan untuk digunakan dalam melihat realitas dan masa depan, sehingga manusia tidak akan lagi terjatuh dalam kesesatan, taqlid dan kesalahan (Ridwan 1998:52). Berdasarkan uraian di atas maka pemaknaan terhadap *qidam* mempunyai kandungan nilai kesejarahan.

Baqā' (kekal) merupakan pengalaman kemanusiaan yang muncul dari lawan sifat *fana'* ini berarti tuntutan pada manusia untuk membuat dirinya tidak cepat rusak atau *fana'*. *Baqā'* adalah ajaran pada manusia untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Lingkungan menurut Hanafi tidak semata-mata lingkungan alam, tetapi juga lingkungan manusia dan sosial (2003:114). Berdasarkan pemaknaan ini maka *Baqā'* mempunyai kandungan nilai kekekalan.

Mukhalafah li al-hawadits (berbeda dengan yang lain) dan *qiyam binafsih* (berdiri sendiri) merupakan tuntunan agar umat manusia mampu menunjukkan eksistensinya secara mandiri dan berani tampil beda, tidak mengekor atau taqlid pada pemikiran dan budaya orang lain (Soleh, 2010). *Qiyam binafsih* adalah deskripsi tentang titik pijak dan gerakan yang dilakukan secara terencana dan dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah kekuasaan yang dimiliki manusia, mempunyai otoritas penuh tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak lain (Soleh, 2010). *Qiyam binafsih* berarti manusia yang mampu hidup dengan kehendaknya sendiri. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan lembaga. Dalam masyarakat yang mandiri, tercipta mekanisme saling

ketergantungan, yaitu interaksi bagian-bagian dengan bagian lain dalam suatu keseluruhan (sistem) sehingga seunya bergerak ke satu tujuan. Berdasarkan pemaknaan itu maka *Mukhalafah li al-hawadits* dan *qiyam binafsih* mempunyai kandungan nilai independen atau kebebasan yang sama dengan makna *Wujud*.

Wahdaniyyah (keesaan) menurut Hanafi bukanlah pengertian matematis atau konsep logika tunggal dan banyak (Hanafi 2010:389) tetapi menunjukkan esensi kemanusiaan yang realitasnya tunggal-unikatif (Santalia 2011). *Wahdaniyyah* berarti kesatuan manusia yang jauh dari semua bentuk dualisme seperti kemunafikan, bermulut dua, dan sikap berubah-ubah menurut keadaan (Hanafi, 2003). Berdasarkan pemaknaan ini maka *Wahdaniyyah* dapat mempunyai kandungan nilai kesatuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Modernisme dalam NPM: Komodifikasi dan Komersialisasi Universitas untuk Kemenangan Ekonomi

Pandangan kaum materialis menurut Ali Syariati membuat manusia tidak bebas. Manusia hanya dilihat sebagai "hewan ekonomi" yang akhirnya menghamba dan diperbudak oleh materi (Mukhlis, 2009). Epistemologi modern yang mendasarkan diri pada materialisme dengan homo ekonomikus dan pasar sebagai premis dalam bidang ekonomi telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Salah satu pengaruhnya terlihat dari invasi prinsip-prinsip manajemen modern yang berlaku di dalam bidang ekonomi dan bisnis ke dalam bidang-bidang nirlaba termasuk pendidikan (Tilaar, 2003). Invasi ini terjadi melalui *NPM* (*New Public Management*) yang menjadikan entitas pendidikan (universitas) dikelola seperti bisnis modern atau dengan kata lain model *university governancenya* adalah model *corporate governance*.

Invasi NPM ke dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa NPM dipandang sebagai term yang generik sehingga dapat diadopsi untuk mereformasi setiap manajemen publik di seluruh dunia (Schedler and Proeller, 2002:163). Pandangan ini menunjukkan pemikiran yang memandang pengetahuan harus dapat dipakai untuk keperluan apa saja, tidak bersifat etis dan tidak terkait dengan dimensi politis manusia sehingga ilmu pengetahuan bersifat netral atau *value free* (Hardiman, 2009: 27). Positivisme telah membangun dinding tebal di

antara pengetahuan dan kehidupan praksis (Hardiman, 2009:28). Ada keterpisahan antara pengetahuan dengan kehidupan praksis.

Kenyatannya konsep NPM tidaklah tepat jika diterapkan di dalam universitas sebagai lembaga pendidikan. Nilai-nilai atau budaya akademik yang melekat pada universitas akan mengalami alineasi karena NPM merupakan sebuah konsep yang dibangun di atas epistemologi modernis yang materialitis-kapitalis. Di bawah NPM peran pendidikan berubah menjadi alat pemenuhan kepentingan ekonomi.

Prioritas pada aspek ekonomi sangat terlihat dari tujuh (7) doktrin NPM yang dinyatakan oleh Hood (1991). Ketujuh doktrin tersebut mencakup (1) manajemen profesional, (2) standar dan ukuran kinerja yang eksplisit, (3) penekanan yang lebih besar pada kontrol *output*, (4) pemecahan unit-unit kerja, (5) persaingan yang lebih besar, (6) pengadopsian praktek manajemen sektor swasta dan (7) penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya (Osborne, 2010:139). Ketujuh doktrin tersebut telah mereformasi sektor publik termasuk universitas.

Salah satu strategi besar yang bisa digunakan untuk melakukan reformasi sesuai konsep NPM menurut Pollitt and Bouckaert (2000) adalah marketisasi jasa publik melalui introduksi tentang kompetisi (Osborne, 2010:139). Strategi ini sesuai dengan doktrin NPM yang ke-4, 5 dan 6 yaitu pemecahan unit-unit kerja, persaingan yang lebih besar dan pengadopsian praktek manajemen sektor swasta. Ketiga doktrin tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa NPM mengikuti logika pasar dengan tujuan maksimasi laba. Semua jasa publik dianggap sebagai komoditas yang diperjual belikan di pasar seperti layaknya barang dagangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Pasar, persaingan serta laba (uang) merupakan ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Laba atau keuntungan merupakan sesuatu yang maha penting agar dapat bertahan di dalam persaingan yang ketat (Suseno, 1999).

Ketika konsep NPM masuk dalam *university governance*, maka universitas secara cepat dikaitkan dengan bisnis (Brown, 2006) yang memberi ruang untuk aktivitas komersial murni (Alestalo dan Peltola, 2006) demi untuk meraih laba (surplus) dan memenangkan persaingan. Universitas mengubah budaya serta *mindset* dosennya menuju komersialisasi pengetahuan (Wong, 2007) dengan menjadikan jasa universitas sebagai sebuah komoditas (Kellerman (2011). Riset dianggap sebagai produk (Miscamble,

2006) sehingga hasil-hasilnya pun dikomersialkan (Mok, 2005). Istilah bisnis seperti pasar, kompetisi, laba dan uang menjadi penting (Kellermann, 2011). Bahasa sektor korporat tersebut sampai pada kamus universitas dan mentalitas korporat telah masuk ke dalam kampus (Miscamble, 2006). Kosa kata mulai mengubah diskursus manajerial menjadi norma (Hussey dan Smith, 2010). Perubahan bahasa menyebabkan perubahan dalam berpikir, perubahan dalam berpikir menyebabkan perubahan aksi dan mengubah pengalaman pendidikan secara keseluruhan (Hussey dan Smith, 2010).

Struktur pembiayaan yang mengarah pada *user charges* (Mok, 2002) dan memberi penekanan pada nilai manajemen yang berpusat pada konsumen (Kim, 2008) merupakan hasil dari adopsi logika kekuatan pasar (Alestalo dan Peltola, 2006). Jasa pendidikan dan riset ditawarkan dan dihargai sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran (Gumport, 2000:71). Hukum permintaan dan penawaran seperti kita ketahui menyatakan bahwa permintaan yang semakin tinggi menyebabkan harga semakin mahal. Akibatnya biaya (harga) universitas atau jurusan yang banyak diminati masyarakat akan semakin mahal. Ditambah dengan persaingan yang semakin ketat dan pembiayaan yang berdasar pada *user charges* biaya pendidikan di universitas yang berkualitas juga menjadi semakin mahal. Mahalnya biaya pendidikan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem yang kapitalis (mengikuti hukum pasar dan kompetisi).

Kapitalisme terkait dengan masyarakat kelas dan kekuasaan terletak pada orang yang menguasai modal. Semua ini berarti kemiskinan bagi yang miskin, dan perlakuan istimewa bagi yang kaya (Al Chaidar, 2000). Ketika biaya pendidikan mahal hanya masyarakat yang mampu membeli saja yang bisa menikmati pendidikan tinggi. Masyarakat dari golongan yang mampu secara keuangan (menguasai modal) mendominasi pendidikan universitas yang berkualitas sehingga masyarakat miskin menjadi semakin tersisihkan dan terdiskriminasi dan akan menempati universitas kelas kedua.

Praktek diskriminasi seperti ini bertentangan dengan nilai kesatuan (pemaknaan kembali atas *Wahdaniyyah*) yang menempatkan manusia dalam kesamaan tanpa diskriminasi ras, kekayaan, warna kulit dan sebagainya. Islam mengajarkan pembangunan sosial atas dasar kesamaan dan keadilan sosial dan hak maksimum bagi yang miskin untuk mencegah akumulasi modal oleh sekelompok orang

(Al Chaidar, 2000). Hal ini sesuai dengan Q.S Al Hasyr yang artinya ”supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. 59:7).

Di samping menyebabkan diskriminasi, konsep NPM menurut Newman (2002:77) juga telah mengubah peran dan tujuan universitas (Newman, 2002:77). Universitas lebih fokus pada *value for money*, dan persaingan berbasis pasar (Parker, 2011) daripada diseminasi pengetahuan. Peran layanan publik diganti dengan jasa untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan komersial (Parker, 2011). Pendidikan vokasional dan riset untuk memenuhi kebutuhan pasar jangka pendek lebih diutamakan (Christensen, 2004) dengan mengubah universitas menjadi mesin ekonomi yang menyediakan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja modern serta sebagai mesin inovasi dalam riset dan pengembangan untuk kepentingan ekonomi (Middlehurst, 2004; Mok, 2009). Universitas berubah menjadi sebuah pabrik di mana pengetahuan diproduksi dan bukan ditemukan (Jansen, 2010). Terjadilah apa yang dinamakan eksploitasi pengetahuan untuk kepentingan ekonomi (Jurado, dkk., 2008) dengan sistem ekonomi pabrik. Universitas menarik mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk memaksimalkan lulusan. Riset dilakukan untuk memproduksi pengetahuan yang kemudian dikomersialkan.

Komersialisasi dijadikan sebagai bagian dari sistem inovasi yang mengacu pada *knowledge economy* yang secara langsung berkontribusi pada ekonomi nasional (Alestalo dan Peltola, 2006). Universitas dituntut untuk terlibat lebih banyak dalam sektor bisnis dan industri (Mok, 2009) dan mengikuti paradigma baru sebagai universitas enterprenur (Etzkowitz, dkk., 2000). Hal ini terjadi karena peran komersialisasi teknologi dari universitas dalam konteks *late-industrializing economies* mengimplikasikan tekanan yang signifikan untuk memasukkan dimensi *enterprenur* yang lebih banyak dalam pendidikan universitas (Wong, 2007).

Enterprenur yang muncul dalam kapitalisme industrial adalah orang yang mengelola manufaktur dan menjual komoditi untuk mendapatkan laba (Budiman, 2002:71). Seorang enterprenur akan menciptakan bisnis, meningkatkan produktivitas untuk uang dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi (Kellermann, 2011). Dimensi entrepreneur yang masuk ke dalam universitas membawa konsekuensi pada aktivitas akademisi yang menurut Alestalo dan Peltola (2006) seluruh aktivitas

akademisi diharapkan mempunyai nilai ekonomi. Institusi cenderung menuju organisasi korporasi penuh dan menjadi enterprise pendidikan (Tolafari, 2005) dengan dengan tujuan memperoleh keuntungan keuangan di samping memperbaiki ekonomi nasional dan regional (Etzkowitz, dkk., 2000).

Tujuan maksimisasi keuntungan atau laba ini merupakan refleksi filosofi korporat sektor privat (Parker, 2011). Filosofi ini telah mengarahkan aktivitas universitas untuk tujuan uang. Kinerja dan hasil secara luas ditranslasikan dalam terminologi uang atau ekonomi (Parker, 2011). Ukuran produktivitas didasarkan pada kriteria menghasilkan uang sehingga semakin banyak dosen yang memandang dirinya sebagai *small businesspeople* (Rhoades, 2005). Aktivitas profesor diarahkan untuk mengadopsi *market-like behavior* yang menggunakan barang, jasa dan tenaga untuk menghasilkan laba (Richwelsa, dkk., 2008).

Uang menjadi tujuan yang paling dominan di universitas, seperti pendapat Kellermann (2011:114) berikut ini:

The university is becoming an object for controlling money input and money output. Knowledge and the institution no longer have special purposes in the development and evolution of science; science itself has already become an instrument for making money. The nomination of modern society as a knowledge society is, in fact, a misnomer, because more or less everything is oriented towards money. Thus we should honestly speak of a money society.

Universitas mengontrol input dan output uang. Sainspun menjadi instrumen untuk menciptakan uang. Nominasi masyarakat modern sebagai *knowledge society* dalam faktanya keliru. Bukan *knowledge society* tetapi *money society*. Universitas berubah menjadi institusi korporasi untuk menghasilkan uang.

Transformasi ini menunjukkan bahwa universitas sebagai lembaga pendidikan tidak mampu mempertahankan jati diri dan misi awalnya. Budaya akademik yang memprioritaskan nilai-nilai pendidikan dan menjadi jati diri dari sebuah universitas akan semakin hilang seiring dengan dominannya budaya korporasi. Misi awal universitas sebagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mempertahankan kritisisme sosial

akan semakin terpinggirkan oleh kekuatan budaya ekonomi. Ketidakmampuan untuk mempertahankan jati diri dan misi awalnya menunjukkan hilangnya nilai kesejarahan (pemaknaan kembali terhadap *qidam*) dalam universitas. Universitas tidak dapat menjadi dirinya sendiri dan berubah menjadi "orang lain".

Budaya akademik bertransformasi menjadi budaya materialistis untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Tujuan uang atau nilai ekonomis atau nilai tukar menunjukkan bahwa universitas beroperasi di bawah pandangan kapitalisme. Di bawah kapitalisme semua nilai direduksi menjadi nilai tukar atau nilai ekonomis yang mengakibatkan hubungan-hubungan sosial dalam semua bidang kehidupan masyarakat dibendakan (reifikasi), dianggap benda atau barang dagangan (Suseno, 1995; 202). Reduksi nilai yang merupakan salah satu karakteristik modernisme bertentangan dengan nilai kesatuan dalam dengan pandangan tauhid. Tauhid memandang kehidupan dan alam semesta tidak hanya memiliki nilai materi tetapi juga non materi.

Efisiensi, Efektivitas dan Akuntabilitas Keuangan sebagai Pendukung dari Materialisme yang Obyektif dan Terukur

Seperti dijelaskan di atas, NPM mempunyai tujuh doktrin. Dibalik ketujuh doktrin tersebut ada sebuah retorika perubahan yang disuarakan oleh NPM yaitu sektor publik harus melakukan transformasi menuju tujuan efisiensi (Newman, 2002:89). Efisiensi yang merupakan rasio antara *input* dan *output* menunjukkan bahwa semakin kecil input dan semakin besar *output* akan menghasilkan efisiensi semakin tinggi. Konsep ini jika dibandingkan dengan doktrin teori ekonomi (pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya) menunjukkan kesamaan. Kesamaan ini bukan sesuatu yang luar biasa karena menurut Osborne (2010:8) *NPM is a child of neo-classical economics and particularly of rational/public choice theory*.

Sebagai turunan dari teori ekonomi klasik yang mempunyai retorika perubahan menuju efisiensi, NPM dalam agenda modernisasi secara tidak langsung menggeser logika pengambilan keputusan dalam organisasi (Newman, 2002:80). Doktrin "manajemen yang profesional" telah mengubah proses pembuatan keputusan di universitas menjadi formal dengan kepemimpinan yang profesional (Braunig,

2011). Universitas tidak lagi dipimpin oleh akademisi tetapi oleh seorang eksekutif profesional yang di-*training* dan mempunyai pengalaman dalam membuat kebijakan dan perencanaan korporat serta dapat mengarahkan manajemen secara efisien (Trakman, 2008). NPM menekankan pada kebutuhan universitas untuk mengembangkan kapasitas menajemennya menuju efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya publik (Reale dan Poti, 2009).

Akibatnya universitas merasionalisasikan aktivitas-aktivitasnya melalui kinerja berbasis hasil dan efisiensi *input-output* (Alestalo dan Peltola, 2006). Misalnya dengan pengukuran kinerja penganggaran yang tergantung pada jumlah mahasiswa dan dana pihak ketiga serta indikator kinerja kuantitatif lainnya (Braunig, 2011) atau dengan mengimplementasikan *balanced score card* (Lawrence dan Sharma, 2002). Kecenderungan ini menunjukkan ada tekanan yang kuat untuk menempatkan output kinerja yang tampak dan dapat diukur (Lawrence dan Sharma, 2002) sehingga kualitas multidimensi dikuantifikasikan menjadi beberapa dimensi (Kellerman, 2011).

Dalam pengajaran, ada kecenderungan untuk meminimasi biaya sekaligus memaksimalkan kontrol manajerial terhadap dosen dan proses pendidikan (Giroux, 2005). Universitas mengutamakan tujuan jangka pendek yaitu efisiensi dan pendapatan (Rhoades, 2005) yang menipiskan peran dosen dan menjadikan akademisi sebagai profesi yang dikelola (Cumming, dkk., 2001). Alat pengendalian *student evaluation of teaching* seperti yang telah dieksplorasi oleh Sigh (2001) didesain untuk mengukur kepuasan konsumen digunakan untuk melegitimasi komodifikasi pendidikan dan mereifikasi hubungan mahasiswa-dosen dalam parameter yang sempit yaitu dalam sistem pengukuran kinerja berorientasi produksi (Lawrence dan Sharma, 2002). Dalam hal penelitian, kinerja dievaluasi berdasarkan pada jumlah publikasi dalam jurnal yang berkualitas/bereputasi dan pada isi dan kontribusi penelitian itu sendiri (Neumann dan Gutrie, 2002). Kontrol yang terlalu ketat atas pekerjaan dosen dengan tujuan mengurangi biaya ini menyebabkan hilangnya kebebasan dosen dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai akademik karena aktivitasnya dibatasi untuk meningkatkan efisiensi. Hegemoni ini bertentangan dengan kebebasan manusia untuk menunjukkan eksistensi dirinya (pemaknaan kembali terhadap *Wujud, mukhalafah li al-huwadits, qiyam binafsih*).

Selain efisiensi dan efektivitas, NPM juga telah memunculkan berbagai skema akuntabilitas dalam makna untuk menghasilkan *best return* yaitu memperoleh dana yang lebih banyak (Cumming, dkk., 2001:12). Pola baru akuntabilitas untuk *outcomes* fokus pada inspeksi dan audit yang mempertahankan konsepsi akuntabilitas yang lebih terbatas dan menekankan pada kebutuhan untuk membatasi perilaku *risk-taking* (Newman, 2002). Misalnya akademi harus memenuhi kriteria tertentu dan menunjukkan tercapainya beberapa indikator untuk tujuan monitoring dan audit (Hussey dan Smith, 2010). Konsep *steering* bergeser dari model tradisional yang melakukan kontrol terhadap *input* menjadi fokus pada output atau hasil yang bersifat eksplisit dengan tujuan mempertahankan universitas agar secara individual berakuntabel untuk mencapai output atau kinerja tertentu (Saliterer, 2011). Mekanisme audit digunakan sebagai alat yang radikal dan signifikan untuk jaminan akuntabilitas publik dan penciptaan *market-framed university* (KIM, 2008).

Tujuan akuntabilitas adalah untuk menunjukkan kemampuan dalam memproduksi hasil, menjalankan organisasi secara efisien serta memproduksi nilai publik yang semakin terukur dan nyata (Gregory, 2009:72) seperti menempati rangking (favorit saat ini) yang telah menjadi bahasa pergaulan akademisi sehari-hari (Miscamble, 2006). Akibatnya aktivitas yang tidak terukur seperti konseling mahasiswa dan aktivitas kemasyarakatan tidak diprioritaskan (Lawrence dan Sharma, 2002).

Akuntansi secara kuat terlibat dalam rekonstruksi akuntabilitas yang bisa dikatakan telah menggeser fokus akuntabilitas dalam skop yang luas untuk *social and community* menjadi akuntabilitas keuangan (Parker, 2011). Akuntabilitas keuangan meyakinkan bahwa:

the revenues are higher than the expenditures to make profit. Therefore, it is essential for them to optimize technically and financially the production process and the outputinput-relation. Meeting the requirements of the principle of economic efficiency is the condition precedent for maximizing profit. (Braunig, 2011:22).

Akuntabilitas diterapkan untuk meyakinkan bahwa pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga yang penting adalah mengoptimalkan baik secara teknis maupun keuangan, proses produksi dan hubungan *input-output*.

Penyisipan akuntansi ke dalam akuntabilitas universitas telah menyebabkan akuntabilitasnya menjadi rusak, seperti apa yang dikatakan oleh Lee Parker (2011:447) berikut ini:

Not only has it translated many philosophies, missions and activities into predominantly financial terms, but it has undercut both the ability to represent and to report university contributions to knowledge, society and community. Social and academic norms as well as cultural expectations and practices risk being supplanted by accounting and financial KPIs as bases for valuing higher education and research.

Berdasarkan pendapat di atas tergambar peran negatif NPM dalam akuntabilitas universitas. Akuntabilitas akuntansi (keuangan) telah mentranslasi misi dan aktivitas universitas dalam terminologi keuangan serta mengabaikan kemampuan untuk merepresentasikan dan melaporkan kontribusi universitas pada pengetahuan dan masyarakat.

Kerusakan bertentangan dengan nilai kekekalan. Kekekalan sebagai pemaknaan kembali terhadap *baqa'* merupakan ajaran pada manusia untuk senantiasa menjaga kelestarian baik lingkungan, alam maupun sosial. Dalam konteks ini akuntabilitas keuangan dalam universitas yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa pendapatan lebih besar dari pengeluaran telah merusak akuntabilitas universitas kepada masyarakat yang terkait dengan misi dan visi untuk mengembangkan pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

NPM dalam artikel ini dipandang sebagai wajah *university governance* dalam dimensi modernisme. Universitas memperlakukan pendidikan sebagai komoditas yang diperjualkan belikan. Setiap aktivitas universitas dikelola layaknya bisnis. Mahasiswa dianggap sebagai konsumen dan riset sebagai sebuah produk. Universitas mengarahkan akademisnya untuk mengadopsi *market-like behavior* yang menghasilkan uang.

Universitas merasionalisasikan aktivitas-aktivitasnya melalui kinerja berbasis hasil dan efisiensi *input-output*. Kriteria utama analisis biaya-manfaat digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan atau menutup sebuah program. Universitas

mengadopsi akuntansi jenis bisnis yang mengutamakan akuntabilitas keuangan.

Universitas menjadi mesin ekonomi yang secara prinsip menyediakan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja modern serta sebagai mesin inovasi dalam riset dan pengembangan untuk kepentingan ekonomi. Universitas yang awalnya ingin mewujudkan masyarakat modern sebagai *knowledge society* berubah menjadi *monetary society*. Tujuan *university governance* adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhumami, A. 2010, *Menimbang Alternatif Pembiayaan Pendidikan Tinggi*, Media Indonesia, 18 Oktober, diunduh dari www.bataviase.co.id
- Bakar, O. 1994. *Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic Science*, Liputo, Y (penerjemah), Tauhid & Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam, diterjemahkan dari, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Bräunig, D. 2011. *Why Universities are not Businesses*, Rondo-Brovetto, P., *The University as a Business?*, 1st Edition, Springer Fachmedien.
- Budiman, H. 2002, *Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas menurut Daniel Bell*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dearing Report. 1997. www.leeds.ac.uk/educol/ncihe
- Heriyanto, H. 2011. *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*. Bandung: Mizan.
- Kertanegara, M. 2005, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Penerbit Mizan.
- _____. 2007. *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas*. Jakarta: Erlangga.
- Kelleher, Michael, F. 2006, *Effectiveness of Governing Bodies*, Conference on Governing Bodies of Higher Education Institution: Roles and Responsibilities, OECD, www.oecd.org.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan,
- _____. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- _____. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Last, S. 2004, *The Sociology of Postmodernism*, Admiranto, G (penerjemah), Sosiologi Postmodernisme. Yogyakarta: Kanisius.
- Lawrence, S., dan Sharma, U. 2002. Commodification of Education and Academic Labour, *Critical Perspectives on Accounting* Vol. 13, 661–677
- Maksum, A. 2012. *Pengantar Filsafat: dari Masa Klasik hingga Posmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Markwell, D. 2003, *University Education: Australia's Urgent Need for Reform*, *Trinity Papers*, No. 27, September.
- Macdonald, H.I. 2011, *The University in the Modern Marketplace*, Rondo-Brovetto, P., *The University as a Business?* 1st Edition, Springer Fachmedien.
- Miscamble, W.D. 2006, *The Corporate University, A Catholic Response*, *America*, Jul 31–Aug 7, pp. 14.
- Menon, M.E. 2003. Views of Teaching-Focused and Research-focused Academics on the Mission of Higher Education, *Quality in Higher Education*, Vol. 9, No. 1, April.
- Muthahhari, M. 1992. *Addawafi'fi Nahul Maddiyah*, Muhammad, A. dan Muzakir (penerjemah), Kritik Islam terhadap Materialisme. Jakarta: Risalah Masa.
- Nagy, J., dan Alan, R. 2008. Can Universities be Good Corporate Citizens? *Critical Perspectives on Accounting*, Vol 19: 1414–1430.
- Neumann, R., dan Guthrie, J. 2002. The Corporatization of Research in Australian Higher Education, *Critical Perspectives on Accounting* Vol 13, 721–741
- Parker, L. 2006. The New University, *Critical Perspectives on Accounting*, Vol 17 pp 491–492
- Purwanto, Y. 2007. *Epistemologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Psikologi Islami*. Bandung: Aditama.
- Rais, A. 1998. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.
- Shimogaki, K. 2007. *Between Modernity and Postmodernity: The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading*, Aziz, I dan Maula, J (penerjemah), Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Sumarna, C. 2005, *Rekonstruksi Ilmu: dari Empirik Rasional Ateistik ke Empirik Rasional Teistik*. Bandung: Benang Merah.
- Suseno, F.M. 1995. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius.
- Swanson, J., Karen, E.M., dan Stephen, B. 2005. Good University Governance in Australia, *Proceeding of 2005 Forum of The Australia Association for Institutional Research*.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilling, M. 2002. The Dialectic of The University in Times Revolution, *Critical Perspectives on Accounting* Vol 13, 555–574.
- Triuwono, I. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- _____. 2010. Mata Ketiga: Se Laen, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi, *Jurnal*

Akuntansi Multiparadigma, Vol. 1, No. 1, April, 1–23.
Waugh, W. 2003, Issues in University Governance: More “Professional” and Less Academic, Abstract, *The*

ANNALS of the American Academy of Political and Social Science January 2003 vol. 585 no. 1 84–96.